

ABSTRAK

KARAKTERISTIK DAN FUNGSI SERTA SISTEM PENGAWASAN TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Oleh:

Rindy Acvionita

10/304969/HK/18575

Permasalahan utama yang akan diteliti adalah tentang bagaimana karakteristik kelembagaan dan fungsi KPK sebagai lembaga negara independen dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia serta bagaimana pula sistem pengawasan terhadap kinerja kelembagaan KPK sehubungan dengan karakteristik dan fungsi yang diberikan oleh Undang-undang terhadap KPK. Jenis penelitian ini merupakan kombinasi antara penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif.

Hasil dari penelitian dalam penulisan hukum ini adalah karakteristik KPK merupakan lembaga negara independen yang peran dan fungsinya paling besar dibandingkan dengan lembaga negara independen yang lain karena kewenangannya mencakup sejak dalam tahap penyidikan hingga proses di persidangan, sehingga wajar apabila KPK memiliki keistimewaan tersendiri untuk menjalankan fungsi yang begitu besar dan mengenai sistem pengawasan yang digunakan terhadap KPK adalah pengawasan melekat dan fungsional.

ABSTRACT

FEATURES AND FUNCTIONS AND MONITORING SYSTEM FOR CORRUPTION ERADICATION COMMISSION (KPK) IN THE STATE SYSTEM OF INDONESIA

Oleh:

Rindy Acvionita

10/304969/HK/18575

The main problem to be studied is about how institutional characteristics and functions of the Commission as an independent state institution in The constitutional system of the Republic of Indonesia as well as how well the system of institutional oversight of the Commission in connection with the performance characteristics and functions provided by the Act to the Commission. This type of research is a combination of empirical legal research and normative legal research.

The results of the research in writing this law is specific characteristics independent Commission is a state agency whose role and functions most large compared with other independent state institutions because of its authority covers since under investigation until the trial process , so it is natural that the Commission has its own privileges to perform the function so big and surveillance systems used on the KPK is attached and functional supervision.